

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi sedang marak di Indonesia. Memang dalam beberapa tahun ini permasalahan hukum di bangsa ini semakin merajalela terutama yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Dan akan hal ini muncullah tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan. Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. Tentunya dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor.

Aturan ini dibuat agar masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriah dkk, 2009). Dalam menjalankan fungsi audit eksternal tersebut, maka BPKP perlu didukung oleh kinerja auditornya

Auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. Oleh karena itu seorang auditor harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman (Marganingsih dan Martani, 2009). Fungsi audit akan efektif dan optimum apabila kinerja auditor ditentukan oleh perilaku auditor tersebut. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007).

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena dia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002). Selain itu keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan

... dapat diartikan oleh profesionalisme terhadap bidang yang ditugaskannya

Profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan komitmen seseorang terhadap organisasinya.

Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari dalam diri seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan Kouzes menemukan bahwa kredibilitas yang tinggi akan mampu menghasilkan suatu komitmen dan dengan komitmen yang tinggi, organisasi mampu menghasilkan bisnis yang baik (Kouzes, 1993 dalam Prasetyo dan Nurul, 2007)

Gaya kepemimpinan (*leadership style*) juga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Gaya kepemimpinan (*leadership style*) merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Menurut Alberto dkk., (2005) dalam Wati dkk (2010) kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) dan Wibowo (2009) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Temuan ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Menurut Sunarto, (2003) dalam Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Good governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Salah satu manfaat yang bisa dipetik dengan melaksanakan *good governance* adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders (FCGI, 2000 dalam Trisnaningsih 2007). Seorang akuntan yang memahami *good governance* secara benar maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak (Trisnaningsih, 2007).

Penelitian ini replikasi dari penelitian terdahulu yakni Wati dkk., (2010) yang dilakukan di Bengkulu pada tahun 2010 yang berjudul "Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman

Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah" Hasil penelitian

menunjukkan bahwa independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pemahaman good governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penambahan variabel yaitu integritas sebagai variable independent dan penelitian dilakukan di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
5. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kinerja auditor .
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis
 - a. Memberikan tambahan dalam pengembangan dibidang akuntansi.
 - b. Menyediakan informasi-informasi yang kemungkinan diperlukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bidang Praktis

Dapat memberikan masukan atau kontribusi praktis untuk organisasi terutama auditor pemerintah dalam menielankan tugas dan mengelola